

BAB I

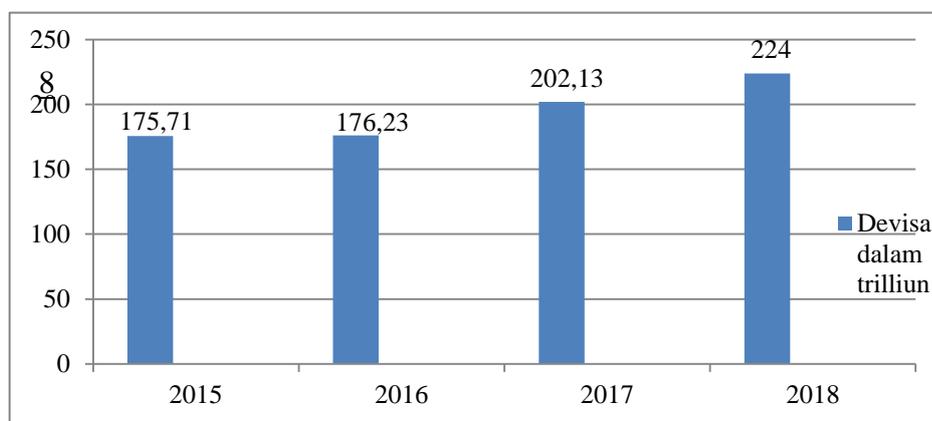
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara memiliki banyak pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah berdasarkan data BPS tahun 2006 – 2016 yaitu 17.504 pulau. Pulau – pulau tersebut memiliki keanekaragaman baik dari segi budaya, tradisi, sumber daya alamnya. Adanya berbagai keanekaragaman yaitu keanekaragaman budaya yang dilatarbelakangi dengan adanya adat istiadat, agama dan kesenian dimiliki oleh suku yang ada di Indonesia. Selain itu juga terdapat keanekaragaman alamnya yang memiliki daya tarik dari alam seperti penguungan, alam bawah laut, serta pantai. (Liga Suryadana : 2013)

Sektor pariwisata menjadi sektor yang berperan penting pada perekonomian Indonesia. Hal ini karena pariwisata merupakan salah satu sumber dalam penerimaan devisa juga sebagai sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan dalam berusaha. Pariwisata juga menjadi sektor yang berkontribusi paling besar pada penerimaan devisa negara yaitu melalui wisatawan negara yang datang berkunjung (Lumaksono, Priyarsono, Heriawan : 2016).

Grafik 1. 1
Jumlah Devisa dalam Pariwisata Nasional Tahun 2015 - 2018



Sumber : LAKIP Kemenpar Tahun 2018

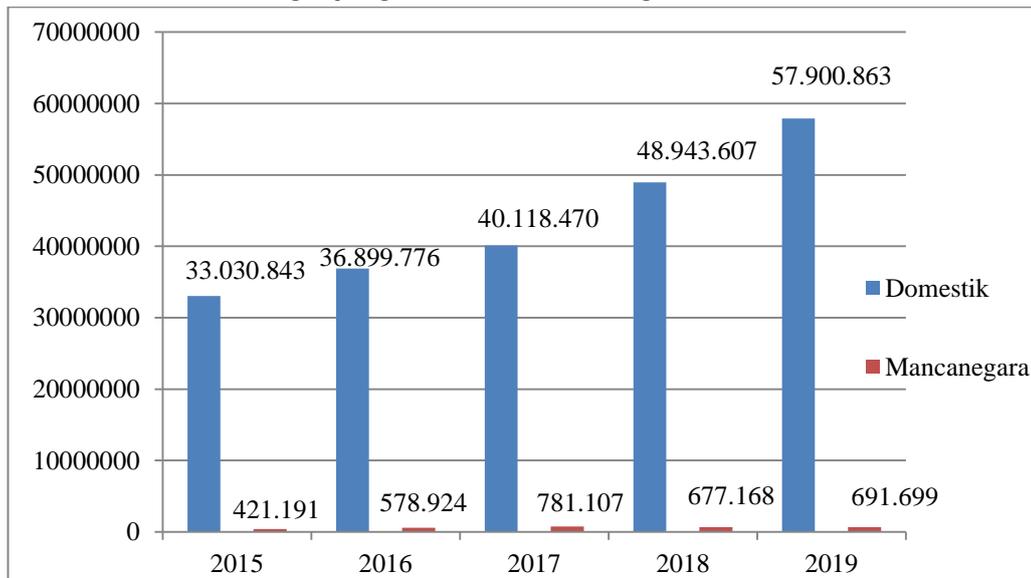
Pada Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa sumbangan pariwisata pada pendapatan nasional cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2015 – 2018.

Pariwisata berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun upaya da;am meningkatkan pendapatan asli daerah, pengembangan serta pemanfaatan sumber daya juga potensi untuk pariwisata nasional ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, Hal ini dikarenakan pariwisata sebagai aktivitas multidimensi pada serangkaian proses pembangunan. Banyaknya pengunjung yang datang baik dari lokal maupun mancanegara untuk berwisata ke daerah – daerah yang menjadi destinasi wisata dapat meningkatkan pendapatan daerah (Y.A Wirahayu dkk : 2019).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia terletak di bagian tengah Jawa berbatasan di sebelah utara dengan Laut Jawa, di sebelah kanan Jawa Timur, di sebelah selatan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan di sebelah kiri dengan Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang banyak baik dari pariwisata alam, pariwisata

budaya, dan pariwisata buatan sehingga banyak mendatangkan pengunjung baik itu domestik maupun mancanegara.

Grafik 1. 2
Jumlah Pengunjung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



Sumber : Didaspora Provinsi Jawa Tengah (2019)

Pada Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa pengunjung domestik dari tahun 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk pengunjung mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2017.

Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak adalah Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Purbalingga, Surakarta dan Kota Semarang. Berdasarkan data jumlah pengunjung Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 bahwa Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah pengunjung ke dua paling banyak setelah Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1. 1
Jumlah Pengunjung Terbanyak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

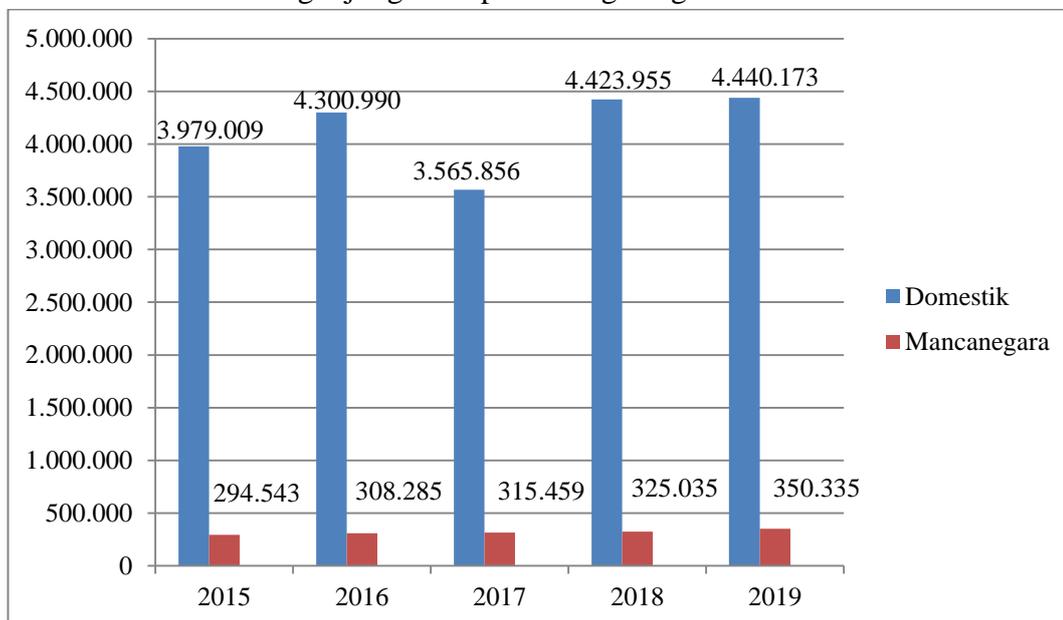
No.	Nama Daerah	Jumlah Pengunjung
-----	-------------	-------------------

1.	Kota Semarang	7.232.342
2.	Kabupaten Magelang	5.153.001
3.	Banyumas	3.943.666
4.	Surakarta	3.562.551
5.	Klaten	3.647.600

Sumber : Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (diolah)

Kabupaten Magelang memiliki ragam potensi pariwisata dan memiliki daya tarik tersendiri pada tiap - tiap destinasi wisatanya. Adapun daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Magelang antara lain wisata buatan, wisata budaya, wisata alam, wisata religi, dan wisata minat khusus. Banyaknya daya tarik wisata di Kabupaten Magelang tersebut menarik untuk dikunjungi. Berikut data grafik jumlah pengunjung yang datang ke Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 – 2019.

Grafik 1.3
Jumlah Pengunjung Kabupaten Magelang Tahun 2015 –2019



Sumber : Didaspora Kabupaten Magelang (2019)

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2015 – 2019, walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah pengunjung yang datang ke Kabupaten Magelang.

Tabel 1. 2
Pendapatan Obyek Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2015 – Tahun 2018

No.	Nama Wisata	Pendapatan (Rp.)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Air Terjun Curug Silawe	10.015.600	8.140.740	4.054.320	6.718.200
2.	Air Terjun Kedungkayang	18.831.000	8.397.872	5.658.800	6.352.300
3.	Air Terjun Sekarlangit	23.883.901	27.057.360	6.284.860	29.192.980
4.	Air Terjun Sumuran Seloprojo	6.554.800	8.128.800	3.137.020	2.669.700
5.	Candi Borobudur	96.485.592.500	101.205.512.500	-	-
6.	Candi Mendut Dan Pawon	90.277.995	92.158.753	96.753.575	119.014.815
7.	Candi Ngawen	-	-	-	-
8.	Candi Selogriyo	-	-	-	-
9.	Curug Delimas	-	-	-	-
10.	Festival Telaga Bleder	-	-	43.790.000	10.956.000
11.	Gardu Pandang Mangli	-	-	-	-
12.	Ketep Pass	3.342.992.000	3,599,327,000	2.456.619.000	3.805.172.800
13.	Pemandian Air Hangat Candi Umbul	108.375.500	141.049.000	186.095.000	180.494.800
14.	Taman Rekreasi Mendut	470.682.000	611.218.000	607.226.000	737.533.000
15.	Telaga Bleder	16.465.000	45.079.000	27.802.090	89.269.500
Total Pendapatan		100.573.670.296	105.745.956.305	3.437.420.665	4.987.374.095

Sumber : Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2018

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang paling banyak pendapatannya berasal dari wisata budaya yaitu Candi Borobudur.

Pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang tidak hanya wisata budayanya saja, namun juga terdapat wisata yang sedang diminati dan dikembangkan yaitu desa wisata. Desa wisata adalah bentuk integrasi diantara beberapa hal seperti akomodasi, atraksi, fasilitas pendukung yang disajikan pada struktur kehidupan masyarakat yang mana menyatu dengan suatu tata cara tradisi berlaku di

dalamnya. Pengembangan pariwisata melalui desa wisata menjadi salah satu cara untuk membangun desa (Sulistiyadi, 2018:117).

Tabel 1. 3
Desa Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2019

No.	Nama Desa Wisata	Kecamatan
1.	Desa Wisata Candirejo	Borobudur
2.	Desa Wisata Bigaran	Borobudur
3.	Desa Wisata Borobudur	Borobudur
4.	Desa Wisata Bumiharjo	Borobudur
5.	Desa Wisata Giripurno	Borobudur
6.	Desa Wisata Giritengah	Borobudur
7.	Desa Wisata Karanganyar	Borobudur
8.	Desa Wisata Karangrejo	Borobudur
9.	Desa Wisata Kebonsari	Borobudur
10.	Desa Wisata Kembanglimus	Borobudur
11.	Desa Wisata Kenalan	Borobudur
12.	Desa Wisata Majaksingi	Borobudur
13.	Desa Wisata Ngadiharjo	Borobudur
14.	Desa Wisata Ngargogondo	Borobudur
15.	Desa Wisata Sambeng	Borobudur
16.	Desa Wisata Tanjungsari	Borobudur
17.	Desa Wisata Tegalarum	Borobudur
18.	Desa Wisata Tuksongo	Borobudur
19.	Desa Wisata Wringinputih	Borobudur
20.	Desa Wisata Wanurejo	Borobudur
21.	Desa Wisata Sumber	Dukun
22.	Desa Wisata Banyubiru	Dukun
23.	Desa Wisata Banyusari	Grabag
24.	Desa Wisata Ngrancah	Grabag
25.	Desa Wisata Sambak	Kajoran
26.	Desa Wisata Sutopati	Kajoran
27.	Desa Wisata Adipuro	Kaliangkrik
28.	Desa Wisata Mangli	Kaliangkrik
29.	Desa Wisata Sukorejo	Mertoyudan
30.	Desa Wisata Mendut	Mungkid
31.	Desa Wisata Senden	Mungkid
32.	Desa Wisata Gunungpring	Muntilan
33.	Desa Wisata Ngawen	Muntilan
34.	Desa Wisata Pagergunung	Ngablak
35.	Desa Wisata Seloprojo	Ngablak
36.	Desa Wisata Jamuskauman	Ngablak
37.	Desa Wisata Munengwarangan	Pakis

38.	Desa Wisata Ngargoretno	Salaman
39.	Desa Wisata Ketep	Sawangan
40.	Desa Wisata Banyuroto	Sawangan
41.	Desa Wisata Mangunsari	Sawangan
42.	Desa Wisata Girikulon	Secang
43.	Desa Wisata Bawang	Tempuran
44.	Desa Wisata Prajeksari	Tempuran
45.	Desa Wisata Kembangkuning	Windusari

Sumber : Didaspورا Provinsi Jawa Tengah 2019 (data diolah penulis)

Kabupaten Magelang memiliki banyak desa wisata yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Magelang salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Muntilan yaitu Desa Wisata Gunungpring di Desa Gunungpring dan Desa Wisata Ngawen di Desa Ngawen. Desa Wisata Gunungpring memiliki daya tarik wisata religi Makam Kyai Raden Santri. Kemudian Desa Wisata Ngawen daya tariknya yaitu peninggalan sejarah candi Budha yaitu Candi Ngawen dan wisata tubing.

Tabel 1. 4

Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Desa Wisata Gunungpring dan Desa Wisata Ngawen Tahun 2016 – 2019

No.	Tahun	Desa Wisata Religi Gunungpring	Pendapatan	Desa Wisata Ngawen	Pendapatan
1.	2016	437.258 orang	Rp. 248.936.000	1374 orang	(belum masuk pendapatan asli desa)
2.	2017	444.603 orang	Rp. 287.100.000	3529 orang	-
3.	2018	505.180 orang	Rp. 334.430.000	1467 orang	-
4.	2019	521.508 orang	Rp. 352.500.000	1205 orang	-

Sumber : Arsip Pengelola Desa Wisata Gunungpring dan Desa Wisata Ngawen (data diolah penulis)

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara Desa Wisata Gunungpring dan Desa Wisata Ngawen. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang datang pada ke dua desa wisata tersebut. Di Desa Wisata Gunungpring memiliki jumlah pengujung hingga ratusan ribu orang dan mengalami peningkatan pengunjung setiap tahunnya serta memiliki pendapatan wisata yang

mencapai ratusan juta tiap tahunnya. Sedangkan untuk Desa Wisata Ngawen jumlah pengunjung sejumlah ribuan orang dan mengalami penurunan jumlah pengunjung dari tahun 2017 – 2019 juga pendapatan wisatanya masih belum masuk pendapatan asli desa.

Desa Wisata Ngawen merupakan desa wisata yang terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang terbagi atas 10 Dusun yaitu dusun Ngawen, Clapar, Judah, Kesaran, Kemiriombo, Kolokendang, Citromengalan, Nganten, Jetis, dan Gejayan. Desa Wisata Ngawen ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 2015 dengan Peraturan Desa Ngawen Kec.Muntilan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen dan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/176/KEP/19/2018 tentang Penetapan Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Sebagai Desa Wisata.

Pada pengelolaan Desa Wisata Ngawen ini dikelola oleh masyarakat setempat yang berasal dari berbagai dusun yang tersebar di wilayah tersebut dengan organisasi pengelola desa wisata di bawah Bumdes Sehati Desa Ngawen yaitu organisasi Pengelola Desa Wisata Ngawen. Adapun dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen ini masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam proses pengelolaan desa wisata salah satunya yaitu pada proses pengorganisasiannya yang belum baik.

Tabel 1. 5
Daftar Pengelola Desa Wisata Ngawen Tahun 2015

No.	Nama	Jabatan
1	Daru Apsari Ratnawati	Pelindung
2	Asep Dwi Sutoro	Pelindung
3	Daru Apsari Ratnawati	Penanggungjawab
4	A. Saptandyo	Ketua

5	Yuli Antaka Fajri	Wakil Ketua
6	Dra. Tri Indarti	Sekretaris
7	Titik Nurul Aisyah	Wakil Sekretaris
8	Damiri	Bendahara
9	Kahono	Seksi Bumi Perkemahan
10	Lutiyono	Seksi Bumi Perkemahan
11	Azis Efendi	Seksi Bumi Perkemahan
12	Agus Santoso	Seksi Bumi Perkemahan
13	Puji Ismiyati	Seksi Outbound
14	Fais Ardian	Seksi Outbound
15	Ahmad Nurrofiq	Seksi Outbound
16	Diyah Restitik	Seksi Konsumsi
17	Menik	Seksi Konsumsi
18	Sri Pudyaningih	Seksi Publikasi
19	Budiyono	Seksi Publikasi
20	Nugroho HB	Seksi Publikasi
21	Rochayanah	Seksi Publikasi
22	Martono Andreas	Seksi Publikasi
23	Nuryanto	Seksi Publikasi
24	Sutrisno	Seksi Publikasi

Sumber : Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Ngawen

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa bahwa pengurus desa wisata ini pada awal terbentuk desa wisata tahun 2015 memiliki anggota sejumlah 24 orang Namun dalam berjalannya kepengurusan dari tahun 2015 hingga sampai saat ini anggota pengurus yang aktif hanya sejumlah 14 orang. Menurut Setyabudi Indartono (2017 : 9) bahwa setiap individu dalam berorganisasi dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi yang dipilih. Agar interaksi berjalan secara efektif maka setiap individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Adanya partisipasi dari setiap individu dapat lebih mengetahui hal apa saja yang harus dilakukannya.

Kurang aktifnya beberapa anggota organisasi Pokdariws di Desa Wisata Ngawen dalam mengelola desa wisata menyebabkan minimnya sumber daya manusia sehingga pengelolaan desa wisata tidak berjalan dengan maksimal dan beban kerja yang semakin banyak. Selain itu juga, belum berjalannya regenerasi pemuda desa untuk mengelola desa wisata sehingga pengurus wisata anggota masih tetap sama dari awal. Adanya permasalahan tersebut tentunya akan berdampak pada pengelolaan wisata yang tidak berjalan maksimal sehingga menyebabkan tujuan dari pengelolaan wisata tidak tercapai.

Penelitian dengan judul “Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman” menggunakan metode penelitian gabungan yaitu kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengorganisasian komunitas yang terjadi dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum. Penelitian ini menggunakan indikator Mukhotib MD, (2012) : integrasi, pemetaan isu, permasalahan, dan potensi komunitas terkait agrowisata, merancang tindakan-tindakan bersama, implementasi kegiatan pengembangan agrowisata, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan feedback dan Indikator keberhasilan peningkatan kapasitas pengorganisasian komunitas (Mukhotib MD, 2012) : mobilisasi komunitas, *collective action*, dan *outcome* bagi komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum terdapat beberapa tahapan yaitu tahap integrasi, pemetaan isu, masalah, dan potensi komunitas, merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan,

monitoring dan evaluasi, refleksi, dan *feedback*. Kapasitas masyarakat di Desa Wisata Kembangarum memiliki nilai rata – rata jumlah responden untuk setiap indikator yaitu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya dari setelah berdirinya Desa Wisata Kembangarum.

Penelitian dengan judul “Pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata Melalui Program Desa Wisata di Desa Pujon Kidul” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata melalui Program Desa Wisata di Pujon Kidul Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan indikator dari Hann dan Topatimasang yaitu tahap perencanaan berupa sosialisasi, pembentukan kelompok dan perencanaan program, tahap pelaksanaan program, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata Melalui Program Desa Wisata di Desa Pujon Kidul sudah dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sosialisasi terkait pemanfaatan dan pengenalan desa wisata antara lain meliputi potensi pertanian dan peternakan serta cara mengembangkan SDA dan sosialisasi terkait program desa wisata. Kemudian terdapat tahapan pembentukan pokdarwis, perencanaan program desa wisata yang berfokus pada kegiatan wisata berbasis edukasi pertanian, edukasi peternakan dan edukasi UMKM. Selanjutnya pelaksanaan program yaitu meliputi program penataan destinasi wisata, pengaturan tempat penginapan, dan pelatihan bagi anggota Pokdarwis. Tahapan terakhir yaitu evaluasi membahas mengenai pencapaian program yang telah dilaksanakan dan menindaklanjuti temuan – temuan yang menjadi bahan perbaikan dalam program desa wisata

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada lokus dan teori yang digunakan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kurang aktifnya beberapa anggota pengelola desa wisata dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen.
- b. Belum berjalannya regenerasi pemuda desa dalam kepengurusan organisasi Pengelola Desa Wisata Ngawen .

Permasalahan di atas menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu mengapa Analisis Pengelolaan Desa Wisata Ngawen ditinjau dari Aspek Pengorganisasian belum berjalan maksimal dan faktor penghambatnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori-teori manajemen publik terutama terkait Analisis Pengelolaan Desa Wisata Ngawen ditinjau dari aspek pengorganisasian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan *skill* penulis dalam meneliti tentang pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian.

c. Bagi Pengelola Desa Wisata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai sumber referensi. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “*Development Of Agrotourism Through Community Organizing Of Tourism Village in Lombok Kulon*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Lombok Kulon terdapat beberapa tahapan yaitu tahap integrasi, pemetaan isu, masalah, dan potensi komunitas, merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan feedback. Kapasitas masyarakat di Desa Wisata Kembangarum memiliki nilai rata – rata jumlah dinilai mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya (Dedy Wijaya Kusuma, dkk, 2017).

Penelitian berjudul “*Planning And Organising Tourist Destinations - The Example Of The Rural Istria Cluster*” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pengorganisasian pada tujuan wisata di kluster pedesaan Istria. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengorganisasian belum berjalan dengan baik dikarenakan pengaturan organisasi internal yang buruk yaitu pada fasilitas akomodasi di daerah pedesaan dan pengaturan pada organisasi eksternal yang terkait dengan infrastruktur dan bisnis komunal dan yayasan yang buruk terkait sistem regulasi hukum, serta latar belakang pendidikan pemilik dan pekerja (Desimir Bošković dkk : 2010)

Penelitian berjudul” *Community-Based Ecotourism Management: The Case of a Cooperative in Mazatlán, Sinaloa, Mexico*” menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui manajemen ekowisata berbasis masyarakat. Pada

penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ada pengelolaan ekowisata di Mazatlán, Sinaloa, Mexico terdapat kerjasama antara pemerintah, para ahli dibidang ekowisata serta masyarakat saling bersinergi dalam pengembangan, pengeperasian, dan pengintegrasian ekowisata. Pengelolaan komunitas serta proses organisasi terstruktur diamati dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan kemudian dikembangkan melalui suatu pelatihan yang diberikan pada mereka dengan dukungan organisasi pemerintah (Jorge Ramos-García dkk :2018).

Pada penelitian berjudul “*Organizing Tourism in Romania and the Dynamics of Tourist Traffic Indicators*” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui organisasi yang mengelola pariwisata di Rumania dan dinamika indikator lalu lintas wisatawan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengorganisasian pariwisata di Rumania dikelola oleh organisasi pusat, organisasi tingkat menengah dan organisasi sektor yang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya informasi terkait data pariwisata serta kurangnya dalam manajemennya berpengaruh pada pengembangan pariwisata di Rumania (Laura Olteanu : 2013).

Pada penelitian berjudul “*Local Wisdom Based Tourist Village Organization in Lombok Tourist Area*” menggunakan metode kualitatif yang memiliki tujuan salah satunya untuk mengetahui pengorganisasian lingkungan Desa Sade. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pengelolaan di Desa Sade yaitu pengorganisasiannya itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Pada pengorganisasia lingkungan Desa Sade dengan ciri khas serta adat desa tersebut.

Namun dalam pelaksanaan pengorganisasian tersebut kebersihan desa wisata masih belum terjaga. (Mohammad Irfan dan Any Suryani : 2017).

Penelitian dengan judul “Pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata Melalui Program Desa Wisata di Desa Pujon Kidul” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata melalui Program Desa Wisata di Pujon Kidul Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata Melalui Program Desa Wisata di Desa Pujon Kidul sudah dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sosialisasi terkait pemanfaatan dan pengenalan desa wisata antara lain meliputi potensi pertanian dan petertanakan serta cara mengembangkan SDA dan sosialisasi terkait program desa wisata. Kemudian terdapat tahapan pembentukan pokdarwis, perencanaan program desa wisata yang berfokus pada kegiatan wisata berbasis edukasi pertanian, edukasi peternakan dan edukasi UMKM. Selanjutnya pelaksanaan program yaitu meliputi program penataan destinasi wisata, pengaturan tempat penginapan, dan pelatihan bagi anggota Pokdarwis. Tahapan terakhir yaitu evaluasi membahas mengenai pencapaian program yang telah dilaksanakan dan menindaklanjuti temuan – temuan yang menjadi bahan perbaikan dalam program desa wisata (Nadiasari & Nurhadi : 2019).

Penelitian dengan judul “Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman” menggunakan metode penelitian gabungan yaitu kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan

pengorganisasian komunitas yang terjadi dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum terdapat beberapa tahapan yaitu tahap integrasi, pemetaan isu, masalah, dan potensi komunitas, merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan *feedback*. Kapasitas masyarakat di Desa Wisata Kembangarum memiliki nilai rata – rata jumlah responden untuk setiap indikator yaitu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya dari setelah berdirinya Desa Wisata Kembangarum (Nurulitha Andini : 2013).

Penelitian berjudul “Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penunjang\pendorong kesuksesan pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran dan menguraikan langkah atau upaya praktis yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Desa Wisata Nglanggeran dalam mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat. Indikator yang digunakan menggunakan teori Longjit dan Pearce (2013) membagi tata kelola destinasi ke dalam beberapa bagian : tujuan, aktifitas atau kegiatan , dan struktur organisasi tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuk organisasi tata kelola pariwisata yaitu Pokdarwis beranggotakan kelompok pemuda. Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran yaitu pengelolaan ekowisata kawasan gunung api purba nglanggeran I dan pengelolaan homestay. Faktor kesuksesan dalam pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran yaitu kesadaran bersama masyarakatnya dan

kemampuan generasi muda dalam mengelola potensi melalui Pokdarwis. Untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran melalui berbagai upaya yaitu pemberian edukasi dan atau sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian layanan ke wisatawan oleh masyarakat melalui koordinasi pokdarwis (Ilham Junaid dan Muh. Arfin M. Salim : 2019).

Penelitian berjudul “Pengelolaan Objek Wisata Situ Hiang Oleh Pemerintah Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk melihat pengelolaan di Obyek Wisata Situ Hiang Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pengorganisasian di Obyek Wisata Situ Hiang Desa Sadewata belum terdapat pembagian dan pengelompokkan pekerjaan masih bekerjasama dengan karangtaruna, Pemdes Sadewata sudah menetapkan pekerjaan yang digunakan, tidak ada pendelegasian wewenang karena dikelola bersama, dan tidak ada tempat kerja, area parkir serta teknologi pendukung dalam Obyek Situ Hiang.

Penelitian berjudul “Analisis Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada proses pengelolaan Desa Wisata Tingkit Lor Kota Salatiga salah satunya pengorganisasiannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga bahwa pada pembagian dan pengelompokan pekerjaan pada organisasi desa wisata yang dibentuk oleh Disbudpar Kota

Salatiga belum berjalan dengan baik karena diakibatkan anggotanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga pembagian serta pengelompokan pekerjaan tidak sesuai, distribusi wewenang belum berjalan dengan baik karena belum ada pemberian otoritas yang jelas, dan koordinasi tidak berjalan dengan baik antara pihak Disbudpar Kota Salatiga dan organisasi pengelola desa wisata (Nur Chasanah dan Herbasuki : 2019)

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p><i>European Journal of Economic and Financial Research</i> <i>Volume 2 Issue 2 2017</i></p> <p><i>Development Of Agrotourism Through Community Organizing Of Tourism Village in Lombok Kulon.</i></p> <p>Dedy Wijaya Kusuma, , Danardana F. Murwani , Agus Suman, Brawijaya , Mit Witjaksono</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teori yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kapasitas dalam pengorganisasian komunitas (Mukhotib MD, 2012) : <ol style="list-style-type: none"> a. Mobilisasi komunitas, b. Collective action, dan Outcome bagi komunitas 2. Pengorganisasian komunitas (Mukhotib MD, 2017: 117-119) : <ol style="list-style-type: none"> a. Integrasi b. Pemetaan Isu, Permasalahan, dan Potensi Komunitas Terkait Agrowisata c. Merancang Tindakan-Tindakan Bersama d. Implementasi Kegiatan Pengembangan Agrowisata e. Monitoring dan Evaluasi 	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Lombok Kulon terdapat beberapa tahapan yaitu tahap integrasi, pemetaan isu, masalah, dan potensi komunitas, merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan feedback. Adapun tujuan dari pengembangan di Desa Wisata Kembangarum ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di Desa Wisata Lombok Kulon. Kapasitas masyarakat di Desa Wisata Kembangarum memiliki nilai rata – rata jumlah dinilai mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Lombok Kulon sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan desa wisata ngawen ditinjau dari pengorganisasiannya.</p>

		f. Refleksi g. Feedback	sebelumnya.	
2.	<i>Researchgate</i> <i>Tourism & Hospitality Management</i> <i>Planning And Organising Tourist Destinations - The Example Of The Rural Istria Cluster</i> Desimir Bošković, Darko Saftić, Klara Trošt	Metode yang digunakan pada penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam pengorganisasian menggunakan model organisasi manajemen destinasi (Magaš : 2010) yaitu : a. Implementasi, b. Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan produk yaitu dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pariwisata	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengorganisasian di kluster pedesaan Istria belum berjalan dengan baik dikarenakan pengaturan organisasi internal yang buruk yaitu pada fasilitas akomodasi di daerah pedesaan dan pengaturan pada organisasi eksternal yang terkait dengan infrastruktur dan bisnis komunal dan yayasan yang buruk terkait sistem regulasi hukum, serta latar belakang pendidikan pemilik dan pekerja.	Penelitian ini dalam pengorganisasian menggunakan model organisasi manajemen destinasi (Magaš : 2010) dari Pitana dan Diarta, sedangkan peneliti menggunakan langkah – langkah pengorganisasian dari Ernest Dale.
3.	<i>Czech Journal of Tourism 02 / 2017 (155—170)</i> <i>Community-Based Ecotourism Management: The Case of a Cooperative in Mazatlán, Sinaloa, Mexico</i> Jorge Ramos-Garcí, Juan Pedro Ibarra-Miche, dan Mónica	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Teori pengelolaan masyarakat (Choi & Sirakaya : 2006) : - Proses Organisasi - Pengambilan Keputusan - Keterkaitan dan Kesamaan Tujuan	Pada penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ada pengelolaan ekowisata di Mazatlán, Sinaloa, Mexico terdapat kerjasama antara pemerintah, para ahli dibidang ekowisata serta masyarakat saling bersinergi dalam pengembangan, pengeperasian, dan pengintegrasian ekowisata.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan desa wisata dalam aspek pengorganisasian.

	Velarde-Valdez		Pengelolaan komunitas serta proses organisasi terstruktur diamati dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan kemudian dikembangkan melalui suatu pelatihan yang diberikan pada mereka dengan dukungan organisasi pemerintah. (Jorge Ramos-García dkk:2018).	
4.	Researchgate <i>Organizing Tourism in Romania and the Dynamics of Tourist Traffic Indicators</i> Laura Olteanu	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pada penelitian ini pengorganisasian pariwisata Stănciulescu G., Micu dalam Laura Olteanu (2013) dikelola dalam beberapa tingkat : - tingkat koordinasi pusat - daerah tingkat regional - organisasi sektor	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengorganisasian pariwisata di Rumania dikelola oleh organisasi pusat, organisasi tingkat menengah dan organisasi sektor yang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya informasi terkait data pariwisata serta kurangnya dalam manajemennya berpengaruh pada pengembangan pariwisata di Rumania.	Penelitian ini berfokus pada pengorganisasian pariwisata dan dinamika indikator lalu lintas wisatawan di Rumania sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan Desa Wisata Ngawen ditinjau dari pengorganisasiannya
5.	<i>International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) Vol-2, Issue-5, Sep - Oct, 2017</i>	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pada pengelolaan desa wisata menurut Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pengelolaan di Desa Sade yaitu pengorganisasiannya itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Pada	Penelitian ini lokusnya ada di Desa Sade Lombok, sedangkan peneliti lokusnya ada di Desa Wisata Ngawen , Magelang.

	<p><i>Local Wisdom Based Tourist Village Organization in Lombok Tourist Area</i></p> <p>Mohammad Irfan dan Any Suryani</p>	<p>dan Ekonomi Kreatif dalam (M.Irfan dan) Any Suryani dikelola oleh satu wadah organisasi masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bentuk kemitraan - manajemen korporasi - yayasan - manajemen properti desa 	<p>pengorganisasian lingkungan Desa Sade dengan ciri khas serta adat desa tersebut. Namun dalam pelaksanaan pengorganisasian tersebut kebersihan desa wisata masih belum terjaga.</p>	
6.	<p>Jurnal Pendidikan Nonformal Volume 14, No. 2, September 2019</p> <p>Pengorganisasian Kelompok Sadar Wisata Melalui Program Desa Wisata di Desa Pujon Kidul Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis</p> <p>Nadasari dan Nurhadi</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam proses pengorganisasian masyarakat menurut keseluruhan proses diuraikan oleh Hann dan Topatimasang (2003) proses terdapat beberapa tahapan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap perencanaan yang kegiatannya dapat berupa sosialisasi, pembentukan kelompok dan perencanaan program. b. Tahap pelaksanaan program merupakan tahap perwujudan dari perencanaan program yang telah di rencanakan c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut yang berguna untuk melihat pencapaian suatu 	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengorganisasian masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Pujon Kidul terdapat beberapa tahapan yaitu a.) sosialisasi (pemanfaatan sumber daya dan pengenalan desa wisata), b.) pembentukan kelompok sadar wisata, c.) perencanaan program desa wisata berfokus pada edukasi pertanian, edukasi peternakan, dan edukasi UMKM, d.) Pelaksanaan program meliputi program penataan destinasi wisata, pengaturan tempat penginapan, dan pelatihan bagi anggota Pokdarwis, e.) evaluasi membahas mengenai pencapaian program yang telah dilaksanakan.</p>	<p>Penelitian ini lokusnya ada di Desa Pujon Kidul Malang, sedangkan peneliti lokusnya ada di Desa Wisata Ngawen , Magelang.</p>

		program dan rencana tindak lanjut yang akan di tempuh selanjutnya.		
7.	<p>Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 3, Desember 2013, hlm.173 – 188</p> <p>Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman</p> <p>Nurulitha Andini</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata (Mukhotib MD, 2012) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Integrasi Pemetaan Isu, Permasalahan, dan Potensi Komunitas Terkait Agrowisata Merancang Tindakan-Tindakan Bersama Implementasi Kegiatan Pengembangan Agrowisata Monitoring dan Evaluasi Refleksi Feedback <p>Indikator keberhasilan peningkatan kapasitas pengorganisasian komunitas (Mukhotib MD, 2012) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobilisasi komunitas, Collective action, dan Outcome bagi komunitas 	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum terdapat beberapa tahapan yaitu tahap integrasi, pemetaan isu, masalah, dan potensi komunitas, merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi, refleksi, dan feedback. Adapun tujuan dari pengembangan di Desa Wisata Kembangarum ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat. Kapasitas masyarakat di Desa Wisata Kembangarum memiliki nilai rata – rata jumlah responden untuk setiap indikator yaitu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya dari setelah berdirinya Desa Wisata</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Kembangarum sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan desa wisata ngawen ditinjau dari pengorganisasiannya.</p>

			Kembangarum.	
8.	<p><i>PUSAKA:Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Volume 1, No.1 (2019) 1-7</i></p> <p>Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta</p> <p>Ilham Junaid dan Muh. Arfin M. Salim</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Longjit dan Pearce (2013) membagi tata kelola destinasi ke dalam beberapa bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tujuan Aktifitas atau kegiatan Struktur organisasi tata kelola 	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa bahwa dibentuk organisasi tata kelola pariwisata yaitu Pokdarwis beranggotakan kelompok pemuda. Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran yaitu pengelolaan ekowisata kawasan gunung api purba nglanggeran I dan pengelolaan homestay. Faktor kesuksesan dalam pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran yaitu kesadaran bersama masyarakatnya dan kemampuan generasi muda dalam mengelola potensi melalui Pokdarwis. Untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran melalui berbagai upaya yaitu pemberian edukasi dan atau sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian layanan ke wisatawan oleh masyarakat melalui koordinasi pokdarwis.</p>	<p>Penelitian ini lokusnya ada di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, sedangkan peneliti lokusnya ada di Desa Wisata Ngawen , Magelang.</p>

9.	<p>Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Galuh Vol 5, No 4 (2018)</p> <p>Pengelolaan Objek Wisata Situ Hiang Oleh Pemerintah Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis</p> <p>Rika Rostika</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan pada fungsi <i>organizing</i> dari Syamsir Torang (2014 : 171)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi dan mengelompokan pekerjaan, 2. Menetapkan pekerjaan yang harus di lakukan, 3. Pendelegasian wewenang, dan 4. Menyediakan tempat kerja dan teknologi pendukung. 	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pengorganisasian di Obyek Wisata Situ Hiang Desa Sadewata belum terdapat pembagian dan pengelompokan pekerjaan masih bekerjasama dengan karangtaruna, Pemdes Sadewata sudah menetapkan pekerjaan yang digunakan, tidak ada pendelegasian wewenang karena dikelola bersama, dan tidak ada tempat kerja, area parkir serta teknologi pendukung dalam Obyek Situ Hiang.</p>	<p>Penelitian ini dalam pengorganisasian dari Syamsir Torang (2014 : 171), sedangkan peneliti menggunakan langkah – langkah pengorganisasian dari Ernest Dale (2001) dan Dyah Hariani (2013).</p>
10.	<p><i>Journal Of Public Policy And Management Review Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019</i></p> <p>Analisis Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga</p> <p>Nur Chasanah dan Herbasuki Nurcahyanto</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Teori fungsi <i>organizing</i> dalam Nur Chasanah dan Herbasuki Nurcahyanto (2019) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan b. Distribusi wewenang c. Koordinasi 	<p>Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pengorganisasian di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga bahwa pada pembagian dan pengelompokan pekerjaan pada organisasi desa wisata yang dibentuk oleh Disbudpar Kota Salatiga belum berjalan dengan karena diakibatkan anggotanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga pembagian serta</p>	<p>Penelitian ini lokusnya ada di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga dan berfokus pada pengelolaan desa wisata secara umum, sedangkan peneliti lokusnya ada di Desa Wisata Ngawen , Magelang dan berfokus pada pengorganisasian dalam desa wisata.</p>

			pengelompokkan pekerjaan tidak sesuai, distribusi wewenang belum berjalan dengan baik karena belum ada pemberian otoritas yang jelas, dan koordinasi tidak berjalan dengan baik antara pihak Disbudpar Kota Salatiga dan organisasi pengelola desa wisata.	
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah dari beberapa penelitian yang berbeda

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut pendapat Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 3) merupakan suatu proses yang mana sumber daya serta personel publik itu diorganisasir juga dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta untuk mengelola keputusan – keputusan pada suatu kebijakan. Sedangkan menurut McCurdy dalam Keban (2008:3) mengemukakan pengertian administrasi merupakan suatu proses politik yang digunakan menjadi salah satu metode untuk memerintah negara serta dianggap sebagai cara prinsipil dalam melakukan berbagai fungsi suatu negara. Administrasi publik bukan hanya sekadar manajerial namun persoalan politik.

Definisi Adminstrasi Publik yang dikemukakan McCurdy dalam Keban (2008:3) sejalan dengan yang dikemukakan oleh John M. Pfiffner serta Robert V. Presthus dalam Pasolong (2007:7), mengemukakan definisi dari administrasi publik terdiri dari implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh badan – badan politik. Adapun badan – badan politik tersebut merupakan suatu koordinasi dari usaha perseorangan maupun kelompok dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah yang terdiri dari pekerjaan sehari – hari. Proses – proses ini meliputi pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah, pengarahan pada kecakapan, dan juga teknik – teknik yang mana jumlahnya tidak terhingga yang diarahkan serta dimaksudkan dimaksudkan pada usaha sejumlah orang. Definisi John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus ini lebih mengarah pada penerapan aktivitas badan politik untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Menurut Felix A. Nigro dan L. Loyd G.Nigro dalam Pasolong (2008:8) mengemukakan Administrasi Publik sebagai kerjasama pada suatu lingkungan pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif dari cabang pemerintahan serta yudikatif dan hubungan diantara mereka. Adapun ketiga cabang tersebut terdapat peranan penting masing – masing dalam perumusan suatu kebijakan dan juga karena bagian daripada proses politik sehingga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kelompok swasta dan perorangan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Definisi menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G.Nigro ini lebih menekankan pada suatu proses dari institusional yaitu bagaimana mengusahakan kerjasama dari kelompok – kelompok sebagai kegiatan publik yang berbeda dengan kegiatan swasta. .

Dari beberapa definisi administrasi publik tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa administrasi publik itu merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun lembaga untuk melaksanakan tugas – tugas dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan efektif serta efisien.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Adanya perkembangan dari ilmu administrasi publik ini dapat dilihat dari perubahan paradigmanya. Menurut Kuhn dalam Keban (2008 : 31 bahwa paradigma adalah cara pandang, suatu nilai - nilai, metode – metode, prinsip dasar, juga merupakan cara memecahkan suatu masalah yang dianut pada suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu.

Nicholas Henry dalam Ikeanyibe (2016) bahwa terdapat enam paradigma administrasi publik yaitu :

a. Paradigma I, Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma politik ini memusatkan perhatian pada kebijakan atau dari ekspresi kehendak rakyat, sedangkan pada administrasi dengan memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan atau kehendak tersebut. Adanya pemisahan antara politik serta administrasi itu dapat dilihat dari adanya pemisahan antara badan legislatif yang memiliki tugas untuk mengekspos kehendak rakyat dan badan eksekutif yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan kehendak tersebut. Kemudian terdapat badan yudikatif yang berfungsi dalam membantu pada badan legislatif untuk menentukan tujuan serta merumuskan suatu kebijakan tersebut. Adapun implikasi dari paradigma ini yaitu administrasi dinilai sebagai sesuatu yang memiliki bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai efisiensi juga ekonomi dari *government bureaucracy*. Paradigma ini lebih menekankan pada lokus saja yaitu *government bureaucracy*, sedangkan untuk fokus administrasi kurang kurang jelas dan terperinci.

b. Paradigma II, Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada paradigma sangat dipengaruhi oleh pandangan dari manajemen klasik. Adapun fokus dari administrasi publik yaitu prinsip – prinsip dari administrasi publik yaitu diantaranya POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* serta *Budgeting*) yang dapat diimplementasikan dimana saja atau universal. Pada lokus paradigma ini tidak pernah dijelaskan secara jelas karena anggapan dari prinsip ini yang berlaku dimana saja sehingga fokusnya lebih ditekankan daripada lokusnya.

c. Paradigma III, Administrasi Negara sebagai ilmu politik. (1950-1970)

Pada paradigma ini memiliki anggapan bahwa administrasi itu juga sebagai ilmu politik. Adapun lokus pada paradigma ini yaitu birokrasi pemerintahan. Kemudian fokus menjadi kabur karena pada prinsip – prinsip administrasi publik sudah terdapat banyak kelemahan. Pada masa ini administrasi publik memiliki krisis identitas karena dominasi ilmu politik yang banyak dalam dunia administrasi publik.

d. Paradigma IV, Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970).

Pada paradigma ini prinsip manajemen yang dulu pernah populer dikembangkan secara ilmiah serta mendalam. Adapun fokus dari paradigma ini perilaku organisasi, penerapan teknologi modern, analisis manajemen dan lain-lain. Arah perkembangan terbagi menjadi dua yaitu orientasinya pada perkembangan ilmu administrasi murni yang mana didukung pada disiplin psikologi sosial dan yang orientasinya yaitu kebijakan publik. Adapun fokus yang dikembangkan ini telah diasumsikan dapat diimplementasikan baik untuk dunia bisnis serta administrasi publik. Oleh karenanya lokus menjadi tidak jelas.

e. Paradigma V, Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

Pada paradigma ini yaitu administrasi publik sudah memiliki fokus serta lokus jelas. Adapun fokus dari administrasi publik yaitu pada teori organisasi, kebijakan publik, teori manajemen. Kemudian lokusnya yaitu pada masalah serta kepentingan publik.

f. Paradigma VI, *Governance* (1990an – sekarang).

Pada paradigma *governance* (tata kelola) ini penting adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor lain termasuk di dalamnya yaitu swasta, dan masyarakat dalam penyediaan layanan. Paradigma ini terdapat beberapa elemen yaitu melibatkan masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi, dan mengakui kapasitas jaringan dalam masyarakat sipil. Pada *governance* berusaha untuk mengatur ulang peran dari sektor publik melalui partisipasi masyarakat dan jaringan *governance*.

Selain paradigma – paradigma tersebut juga terdapat tiga paradigma – paradigma lain (Keban, 2008:36) yaitu :

1. *Old Public Administration*

Menurut Miftah Thoha (2017:72) bahwa pada paradigma ini memiliki konsep yang sangat legalistik, institusional dan terdapat berbagai macam aturan yang mengikat di dalamnya, struktur organisasi yang berhierarki dimana kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsinya sehingga sangat sentralistik dan dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pelayanan publik. Adapun sistem birokrasi yang dijalankan masih sulit untuk dijangkau oleh masyarakat dikarenakan dalam proses birokrasi tersebut masih kaku dan berhierarki *top down*.

2. *New Public Management*

Paradigma ini muncul karena paradigma terdahulu yaitu *Old Public Administration* kurang efektif dalam memecahkan suatu masalah serta memberikan pelayanan publik termasuk di dalamnya membangun

masyarakat. NPM dalam administrasi publik dipandang sebagai pendekatan yang menerapkan pengetahuan serta pengetahuan dari dunia manajemen bisnis juga disiplin lainnya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas serta kinerja pelayanan publik. Menurut Hood dalam Keban (2006 : 36) terdapat tujuh komponen doktrin yaitu :

- a. Adanya pemanfaatan dalam manajemen profesional ke sektor publik.
- b. Adanya penggunaan pada indikator kerja.
- c. Adanya penekanan lebih besar pada kontrol output.
- d. Adanya pergeseran perhatian pada sebuah unit - unit yang mana lebih kecil.
- e. Adanya pergeseran pada kompetisi yang dinilai lebih tinggi.
- f. Adanya penekanan pada gaya sektor swasta ke praktik suatu manajemen.
- g. Adanya penekanan pada sebuah disiplin juga dalam penghematan yang dinilai lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

3. *New Public Service*

Paradigma *New Public Service* munculnya paradigma NPM setelah kedua tokoh yaitu J.V Denhart dan R.B Denhart yang memberi saran untuk dapat meninggalkan OPA dan NPM dan kemudian beralih ke NPS. Menurut Denhart & Denhart dalam Keban (2008:37) mengemukakan administrasi publik harus:

- a. Melayani masyarakat namun bukan pada pelanggan (*serve citizen not customers*).

- b. Mengutamakan pada sebuah kepentingan publik (*seek the public interest*).
- c. Lebih menghargai pada kewarganegaraan daripada sebuah kewirausahaan (*value citizenship than entrepreneurship*).
- d. Berfikir secara strategis serta bertindak dengan demokratis (*think strategically and democratically*).
- e. Akuntabilitas disadari bukan suatu hal yang mudah (*recognize that accountability is not simple*).
- f. Melayani ketimbang melakukan pengarahan (*serve rather than steer*).
- g. Menghargai pada orang – orang yang tidak hanya dilihat pada produktivitas saja (*value people, not just productivity*).

Penelitian ini mengacu pada paradigma *New Public Service* (NPS). Kaitan paradigma tersebut dengan penelitian ini karena dalam paradigma NPS melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyoroti fokus dari NPS karena dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen ditinjau dari aspek pengorganisasian melibatkan masyarakat langsung dalam proses pengelolaan desa wisata. .

1.6.3 Manajemen Publik

Menurut Overman dalam Pasolong, (2007:83) bahwa manajemen publik merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek – aspek yang ada dalam organisasi dan juga diantara fungsi – fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* serta *controlling* dengan di sisi lainnya yaitu SDM, fisik, keuangan, politik, dan informasi.

Pengertian manajemen Publik dari segi keilmuan menurut (Ott, Hyde & Shafritz, dalam Wijaya & Danar, 2014: 1) adalah cabang yang ada pada administrasi publik khususnya membahas terkait dengan desain program serta restrukturisasi organisasi, alokasi pada sumber daya melalui suatu sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, evaluasi program juga audit.

Pada umumnya manajemen sektor publik mengatur organisasi sektor publik. Manajer ini yang nantinya berperan penting untuk mengatur organisasi sektor publik dalam berbagai hal. Fokus dari manajemen publik itu internal dan eksternal. Fokus dalam internal yaitu bagaimana mengatur organisasi sektor publik untuk dapat bekerja secara optimal sehingga dapat mencapai tujuan. Manajemen publik tidak dapat mengabaikan eksternal organisasi sektor publik. Manajemen publik juga dapat dikatakan sebagai suatu proses dalam menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan non SDM sesuai dengan perintah kebijakan publik.

Gambaran umum mengenai Manajemen Publik menurut Laurence Lynn dalam Wijaya & Danar (2014:2) yaitu sebagai suatu seni, ilmu dan profesi. Adapun manajemen Publik sebagai sebuah seni yaitu sebuah aktivitas yang bergantung pada situasi dan kondisi dimana beroperasi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Menurut Donovan dan Jackson dalam Wijaya & Danar (2014:13) bahwa fungsi manajemen publik yaitu :

- a. Perencanaan, terdiri atas :1) menciptakan sebuah kebijakan, tujuan, serta standar, 2) mengembangkan suatu aturan dan prosedur, 3) mengembangkan rencana - rencana, 4) menganalisis suatu lingkungan, dan 6) mengevaluasi sebuah efektivitas dari proses perencanaan.
- b. Pengorganisasian, terdiri atas : 1) membagi tugas pekerjaan pada tiap – tiap orang, 2) menciptakan suatu struktur secara fungsional serta sosial, 3) adanya pendelegasian otoritas, 4) menciptakan sebuah garis otoritas juga komunikasi, 5) mengkoordinasikan pekerjaan – pekerjaan dari bawahan, dan 6) mengevaluasi sebuah efektivitas dari proses pengorganisasian.
- c. *Staffing*, terdiri atas : 1) menentukan tipe orang mana yang harus dipekerjakan, 2) merekrut orang yang memiliki prospek baik, 3) adanya penyelesaian pegawai atau pekerja, 4) melakukan *training* serta pengembangan pada staff, 5.) melakukan adahya penilaian suatu kinerja dan 6) melakukan sebuah evaluasi dalam program staffing.
- d. *Leading*, terdiri atas: 1) mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan, 2) menjaga juga memelihara semangat dalam kerja, 3) memotivasi para staff. 4) menciptakan suatu iklim pada organisasi kondusif, dan 5) melakukan sebuah evaluasi terhadap efektivitas dari kepemimpinan pemimpin.
- e. *Controlling*, terdiri atas: 1) menetapkan suatu standar, 2) menciptakan adanya perubahan untuk mencapai tujuan organisasi, 3) mengembangkan suatu struktur serta proses pada akuntabilitas, dan 4) mengevaluasi suatu kinerja.

Jadi kesimpulannya bahwa manajemen publik adalah proses untuk mengatur terutama organisasi publik sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut.

1.6.4 Manajemen

Manajemen menurut Stoner Wankel dalam Pasolong, (2007:82) secara harfiah diartikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian dalam upaya anggota dari organisasi dan penggunaan pada seluruh sumber daya organisasi lainnya guna mencapai tujuan dari organisasi.

Menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2008 : 92) bahwa manajemen adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada tingkat suatu organisasi tertentu. Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry Simamora dalam Pasolong (2007:83) yaitu sebagai prosed dari pendayagunaan bahan baku serta sumber daya manusia dalam mencapai tujuan.

Manajemen menurut G. R Terry dalam Dyah Hariani (2013:8) mengemukakan bahwa manajemen itu sebagai proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengendalian guna menentukan juga mencapai sebuah sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dengan melalui pemanfaatan dari sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i (2016:15) bahwa manajemen adalah proses dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya organisasi dengan melalui suatu kerjasama dari para anggota di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif juga efisien. Adapun terdapat

sejumlah unsur – unsur dalam manajemen menurut Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i (2016:15) yaitu :

- a. Manusia (*men*)
- b. Uang (*money*)
- c. Barang - barang (*materials*)
- d. Mesin (*machines*)
- e. Metode (*methods*)
- f. Pasar (*market*).

Unsur – unsur dalam manajemen tersebut memiliki fungsi tersendiri yang saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses terdiri perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuan..

1.6.5 Fungsi – Fungsi Manajemen

Manajemen untuk menggunakan fungsi – fungsinya dalam menggerakan suatu sekelompok manusia dengan cara mempergunakan sebuah metode ilmiah yang dibantu oleh sumber atau faktor produksi tertentu. Fungsi dari manajemen tersebut memiliki keterkaitan diantara satu serta yang lainnya. Namun terdapat pendapat yang berbeda dari beberapa para ahli sehingga belum terdapat suatu kesatuan pendapat mengenai jenis fungsi manajemen. Adapun pendapat - pendapat dari para ahli adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Fungsi – Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

No.	Nama Ahli	Fungsi – Fungsi Manajemen
1.	Henry Fayol	a). <i>Planning</i> , b). <i>Organizing</i> , c). <i>Commanding</i> , d). <i>Coordinating</i> , e). <i>Controlling</i>
2.	Koontz Donnel	a). <i>Planning</i> , b). <i>Organizing</i> , c). <i>Staffing</i> , d). <i>Directing</i> , e). <i>Controlling</i>
3.	G. R Terry	a.) <i>Planning</i> , b.) <i>Organizing</i> , c.) <i>Actuating</i> , d.) <i>Controlling</i>
4.	William New Man	a) <i>Planning</i> , b) <i>Organizing</i> , c) <i>Assembling of Resources</i> , d) <i>Directing</i> , e) <i>Controlling</i>
5.	S. S Siagian	a) <i>Planning</i> , b) <i>Organizing</i> , c) <i>Motivating</i> , d) <i>Controlling</i>
6.	Ernest Dale	a). <i>Planning</i> , b). <i>Organizing</i> , c). <i>Staffing</i> , d). <i>Directing</i> , e). <i>Innovating</i> , f). <i>Representing</i> , d). <i>Controlling</i>
7.	Oey Liang Lee	a). <i>Planning</i> , b). <i>Organizing</i> , c.) <i>Directing</i> , e.) <i>Coordinating</i> , e.) <i>Controlling</i>
8.	James Stoner	a. <i>Planning</i> , b.) <i>Organizing</i> , c.) <i>Leading</i> , e.) <i>Controlling</i>

Sumber : Dyah Hariani (2013), Hani Handoko (2015)

1.6.6 Pengorganisasian

Pada penelitian menggunakan salah satu fungsi manajemen yaitu pengorganisasian. Adapun beberapa pengertian dari pengorganisasian dari beberapa para ahli sebagai berikut :

Pengorganisasian sebagai proses pengelompokan orang – orang, alat – alat, tugas – tugas, tanggung jawab serta wewenang secara menyeluruh sehingga akan nantinya akan tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Sondang Siagian dalam Syamsuddin, 2018:66).

Menurut Malayu Hasibuan dalam Badrudin (2015.:111) bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses dari penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang – orang di setiap aktivitas, menyediakan alat – alat yang dibutuhkan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut.

Pengorganisasian menurut Winardi dalam Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i (2016:40) merupakan proses pekerjaan – pekerjaan yang ada dibagi ke dalam komponen – komponen yang bisa ditangani dan berbagai aktivitas yang mengkoordinasikan hasil yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan tertentu

Menurut G. R Terry dalam Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i (2016 : 40) pengorganisasian yaitu tindakan dalam mengusahakan suatu hubungan – hubungan kelakuan yang efektif antara orang – orang sehingga kemudian mereka dapat bekerjasama secara efisien dengan demikian mereka dapat memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas – tugas tertentu serta dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

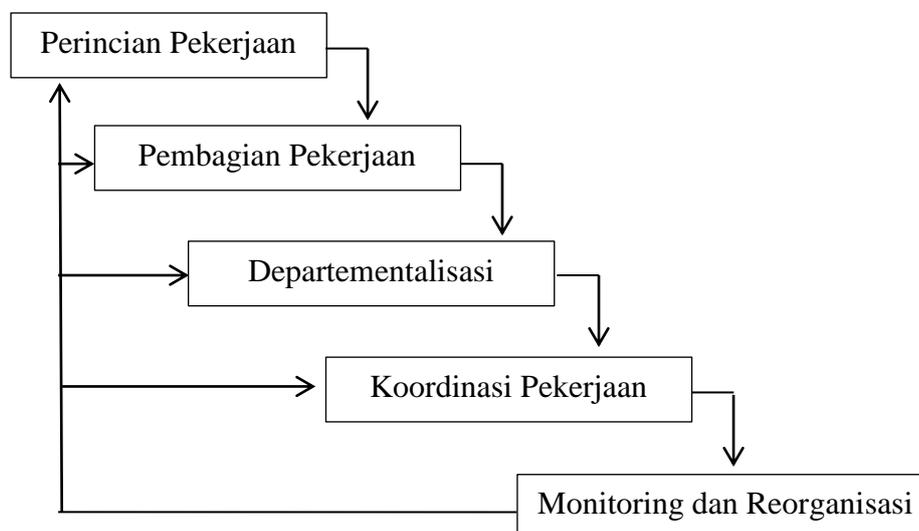
1.6.7 Langkah – Langkah Pengorganisasian

Menurut Ernest Dale dalam Yayat M.Herujito (2001 : 216) proses pengorganisasian merupakan suatu proses yang multi langkah :

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk pertama – tama harus menetapkan tugas organisasi secara keseluruhan terlebih dahulu.

2. Pembagian kerja pada aktivitas – aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang juga sekelompok orang. Tiap – tiap orang dibebani tugas yang sama dengan rekan kerja yang disesuaikan dengan kualifikasi (keahlian) dan mendapat beban kerja dalam spesifikasi yang sama.
3. Mengelompokkan aktivitas – aktivitas yang sama secara logis ke dalam departemen – departemen serta menyusun skema kerjasama antar departemen.
4. Menetapkan mekanisme (aturan main) guna mengkoordinasikan pekerjaan anggota – anggota organisasi ke dalam kesatuan yang harmonis. Adanya koordinasi terhadap para anggota pada pekerjaannya agar mereka melakukan tindakan sesuai dengan tujuan organisasi.
5. Melakukan monitoring dan reorganisasi untuk memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian gunanya untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas

Gambar 1. 1
Proses Pengorganisasian menurut Enest Dale



Sumber : Yayat M.Herujito (2001 : 216)

Menurut Dyah Hariani (2013:90) bahwa terdapat sekurang – kurangnya enam langkah dalam melakukan tindakan pengorganisasian :

a. Mengetahui tujuan

Tujuan dalam organisasi itu perlu dan harus direncanakan lebih dahulu. Apabila tujuan tersebut sudah ditetapkan maka selanjutnya adalah dengan mengetahui apakah organisasi yang telah menampung orang – orang bekerja di dalamnya sudah sepadan dengan bahan – bahan yang tersedia serta tempat kerja yang memadai sehingga nantinya sasaran dapat dicapai menurut tujuan yang dikehendaki.

b. Membagi pekerjaan ke dalam bagian – bagian

Membagi habis setiap pekerjaan dalam kegiatan – kegiatan pada suatu bagian yang artinya menjadi tugas dari manajer untuk menyusun daftar kegiatan pokok yang lengkap – tidak harus secara terperinci sehingga semuanya terdaftar.

c. Menggolong – golongkan kegiatan ke dalam satuan yang dapat dikelompokkan

Adapun langkah ini sudah menjerumus pada usaha bahwa suatu pembagian pekerjaan sampai pada titik yang tugasnya dapat dilaksanakan secara konkret serta dapat diwujudkan ke dalam praktek/semua kegiatan sehingga dapat diketahui kegiatannya bila dilihat dari posisinya.

- d. Menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan dan menentukan/menyediakan alat – alat serta tempat/ruangan fisik yang diperlukan

Hal ini ditekankan pada apa yang diharapkan dari seseorang yang harus melakukan suatu tugasnya. Untuk pengatur/pengawas hal ini memudahkan dalam mengikuti cara kerja dari seseorang dan memberi keterangan tentang pekerjaan yang harus dilakukan dan dihadapi oleh manajer.

- e. Penugasan personalia yang cakap

Menempatkan personalia yang cakap sesuai dengan beban pekerjaannya adalah suatu keharusan dalam rangka pengorganisasian. Bila terjadi sebuah reorganisasi, sementara personil yang ada tetap diperlukan karena terdapat pengalaman pekerjaan yang bersangkutan mempunyai ikatan dengan tugasnya yang baru nantinya.

- f. Mendelegasikan wewenang

Adanya wewenang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang manajer wajib mendelegasikan sebagian wewenangnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan khusus pada bawahannya.

Proses pengorganisasian oleh Malayu Hasibuan dalam Badrudin terdapat 8 langkah (2015:114)

- a. Manajer harus mengetahui tujuan dari organisasi yang ingin dicapai apakah itu *profit motive* atau *service motive*
- b. Penentuan kegiatan - kegiatan yaitu manajer harus mengetahui, merumuskan, serta menspesifikasi kegiatan - kegiatan apa yang dibutuhkan dalam mencapai

tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan

- c. Pengelompokan pekerjaan yaitu manajer harus mengelompokkan kegiatan - kegiatan dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama dan kegiatan tersebut bersamaan dan berkaitan erat disatukan dalam satu departemen atau satu bagian

- d. Pendelegasian wewenang

Manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang nantinya didelegasikan pada setiap departemen

- e. Rentang kendali

Manajer harus menetapkan berapa jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian

- f. Peranan perorangan

Manajer harus menetapkan tugas - tugas individu secara jelas, supaya tumpang tindih dapat dihindarkan

- g. Tipe organisasi

Manajer harus menetapkan tipe organisasinya yang diapakah apakah *line organization*, *line staff organization* atau *function organization*

- h. Struktur, manajer harus menetapkan struktur organisasi yang seperti apa yang akan digunakan.

1.6.8 Pariwisata

Pariwisata menurut Leiper dalam Yoeti (2016 : 10) yaitu suatu sistem yang terbuka dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam lingkungan yang luas dari

mulai unsur manusia seperti wisatawan. Terdapat tiga unsur geografis yaitu negara asal wisatawan, negara tempat yang dijadikan transit, dan daerah tujuan wisata dan unsur ekonomi yaitu industri pariwisata.

Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 merupakan berbagai macam wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh semua pihak yaitu masyarakat, swasta, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Menurut UNWTO dalam Yoeti (2016 : 45) mendefinisikan pariwisata yaitu

“Tourism comprises the activities of persons, travelling to and staying in place outside their unusual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes.”

Definisi menurut pariwisata UNWTO adalah pariwisata terdiri dari aktivitas orang-orang untuk berpergian dan menetap di suatu tempat di luar dari lingkungan biasanya yang tidak lebih dari satu tahun berturut-turut yang digunakan untuk beristirahat, bisnis dan tujuan lain.

Mathieson dan Wall dalam Pitana dan Diarta (2016 : 46) bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama yaitu *a dynamic element* yaitu travel ke suatu

destinasi wisata. *A static element* yaitu singgah di daerah tujuan, dan *a consequential element* yaitu akibat dari *dynamic element* dan *static element* (khususnya untuk masyarakat lokal) meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan (dalam Suwantoro, 2004 : 3).

Menurut Pendit dalam I Gusti Bagus Rai Utama (2017:145) terdapat beberapa jenis pariwisata menurut motif untuk mengunjungi tempat wisata. Adapun jenis pariwisata yaitu :

1. Wisata Budaya

Merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri untuk mengetahui keadaan rakyat di suatu wilayah, mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, cara hidup serta mempelajari budaya dan keseniannya.

2. Wisata Maritim

Wisata ini sering disebut wisata bahari. Biasanya wisata ini dikaitkan dengan kegiatan di air yaitu di danau, pantai, teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan, mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan.

3. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau

daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

4. Wisata MICE

MICE (Pendit, 2017:148) diartikan sebagai wisata konvensi dengan batasan berupa usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi pertemuan sekelompok orang yaitu negarawan, usahawan, cendikiawan, dsb dimana untuk membahas masalah-masalah mengenai kepentingan bersama. MICE ini sebagai suatu kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan *business*.

5. Wisata Agro

Filosofi agrowisata yaitu untuk meningkatkan pendapatan kaum tani dan meningkatkan kualitas alam pedesaan menjadi hunian yang benar-benar dapat diharapkan sebagai hunian yang berkualitas, memberikan kesempatan masyarakat untuk belajar kehidupan pertanian yang menguntungkan dan ekosistemnya.

6. Wisata Buru

Merupakan jenis wisata yang ada di negara memiliki daerah atau jutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata ini diatur dalam bentuk wisata buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

7. Wisata Ziarah

Merupakan jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat

1.6.9 Desa Wisata

Menurut Sulistyadi dkk menjelaskan bahwa Desa Wisata (2019,:57) merupakan bentuk intregrasi dari atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung dimana digambarkan pada suatu struktur masyarakat yang didalamnya terdapat tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata memiliki keunikan tersendiri atau daya tarik ciri khas baik itu berupa keunikan fisik lingkungan alamnya maupun kehidupan sosial ekonomi yang mana kemudian dikemas secara alamiah dan menarik sehingga menarik pengunjung ke desa (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011). Desa Wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang mana menawarkan keaslian di dalamnya baik berupa adat istiadat, kehidupan sosial ekonomi maupun potensi desa berupa daya tarik sebagai hal yang mampu untuk dikembangkan contohnya antara lain atraksi, makanan dan minuman, cinderamata dan lain-lain (Chafid Fandeli, 2002).

Menurut Pariwisata Ini Rakyat dalam Sulistydi dkk (2019:57) mendefinisikan desa wisata sebagai suatu daerah wisata yang menyajikan serta mencerminkan suasana dan keaslian pedesaan baik itu dari segala aspek yaitu kehidupan sosial, ekonomi, sosial, keseharian, adat istiadat dan memiliki arsitektur dan tata ruang serta kegiatan perekonomian yang unik dan khas sehingga menarik dan memiliki potensi dalam komponen kepariwisataanya dalam pengembangannya.

Pada pengertian sederhananya, desa wisata merupakan suatu obyek wisata terdapat potensi baik dari seni dan budaya yang ada di suatu wilayah pedesaan yang unggulan berada di pemerintah daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa desa wisata adalah desa yang secara mandiri memiliki potensi dan dapat menjual berbagai atraksi – atraksi sebagai daya tarik tanpa ada keterlibatan dari investor, sehingga setiap kabupaten perlu membuat program adanya pengembangan desa wisata yang sesuai dengan pola Pariwisata Inti Rakyat tersebut.

Berdasarkan Peraturan Desa Ngawen Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Wisata Ngawen. Desa Wisata merupakan wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Maksud dibentuknya Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Soetarsono Priasukmana, dalam Sulistyadi dkk 2019: 58 tujuan dan sasaran pembangunan desa wisata antara lain :

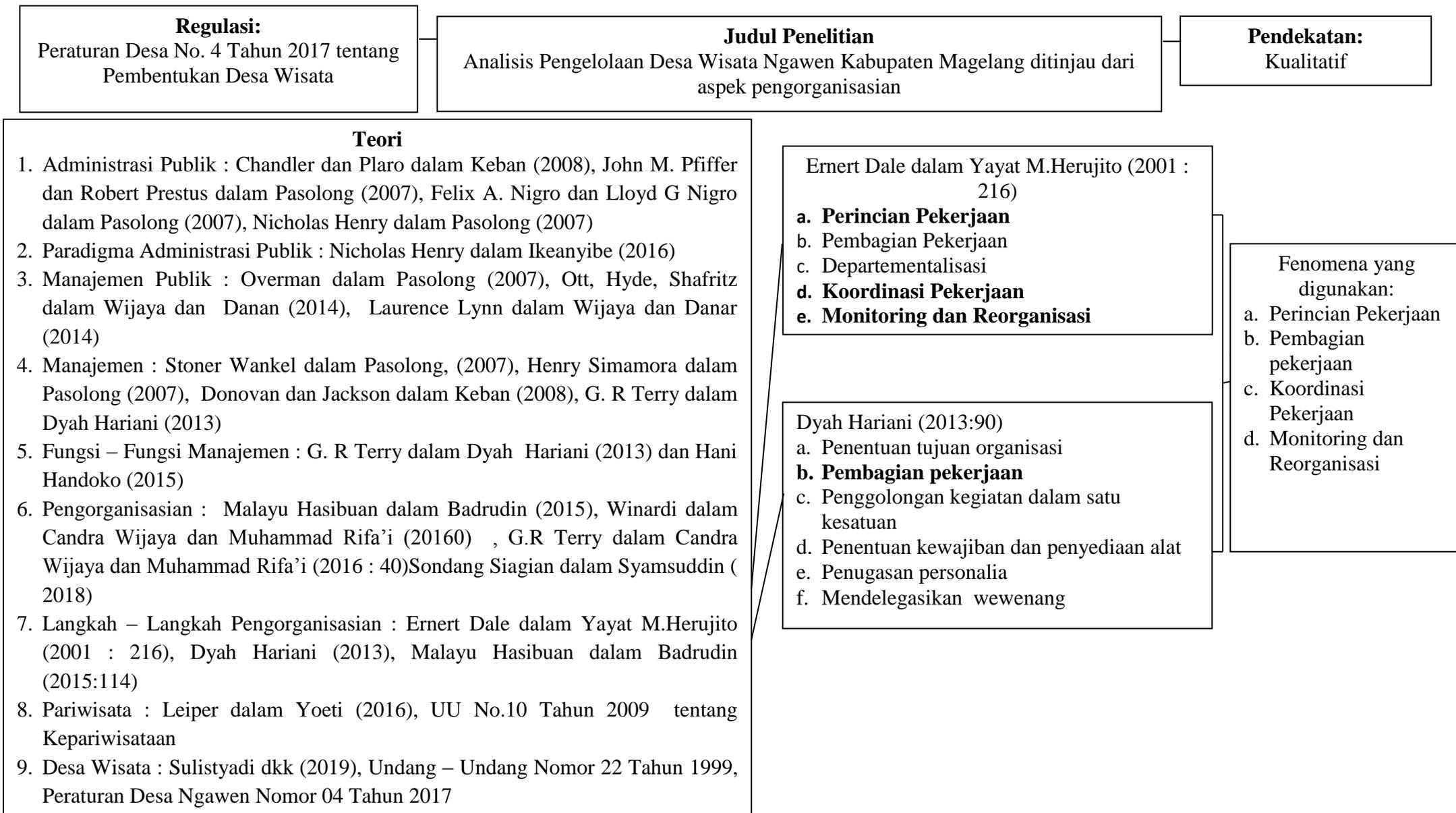
- a. Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif.
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.

Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2011) bahwa terdapat syarat dan faktor pendukung dalam membangun desa wisata antara lain :

- a. Memiliki potensi yang unik dan khas baik dari sumber daya wisata alam, sosial, dan budaya yang mampu untuk dikembangkan dalam menarik kunjungan wisatawan.
- b. Memiliki sumber daya manusia yang mendukung.
Memiliki sarana prasarana berupa komunikasi, akomodasi, dan aksesibilitas sebagai alokasi ruang dalam pengembangan fasilitas pendukung tersebut.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan salah satu unsur pada suatu penelitian agar persoalan utama yang nantinya akan diteliti menjadi lebih fokus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Desa Wisata Ngawen ditinjau dari aspek pengorganisasian. Pada penelitian ini menggunakan langkah – langkah dalam pengorganisasian dari Ernest Dale dan Dyah Hariani. Fenomena yang diteliti :

1. Perincian pekerjaan

Perincian pekerjaan adalah merinci seluruh pekerjaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan gejala sebagai berikut::

- a. Tujuan organisasi dalam pengelolaan Desa Wisata Ngawen, Kabupaten Magelang.
- b. Tugas organisasi secara keseluruhan dalam Desa Wisata Ngawen, Kabupaten Magelang
- c. Sumber daya dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen.

2. Pembagian pekerjaan

Pembagian pekerjaan adalah membagi pekerjaan pada aktivitas – aktivitas dengan gejala sebagai berikut:

- a. Penyusunan kegiatan – kegiatan dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen
- b. Pembagian kerja dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen
- c. Peran pemuda dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen

3. Koordinasi Pekerjaan

Koordinasi pekerjaan adalah suatu tindakan agar anggota pada suatu organisasi dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi dengan gejala sebagai berikut:

- a. Koordinasi internal dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen
- b. Koordinasi eksternal dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen

4. Monitoring dan Reorganisasi

Monitoring dan reorganisasi yaitu memantau efektivitas pada suatu organisasi serta mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas dengan gejala sebagai berikut

- a. Monitoring dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen.
- b. Reorganisasi dalam organisasi pengelola Desa Wisata Ngawen.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif yaitu digunakan peneliti untuk meneliti pada suatu obyek yang ilmiah dimana peneliti itu sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) , analisis data yang sifatnya induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:9).

1.9.2 Situs Penelitian

Situs merupakan lokus tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Ngawen, Kabupaten Magelang. Desa Wisata Ngawen

adalah sebuah desa wisata yang terletak di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* sebagai suatu teknik pengambilan sampel dimana sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling tahu mengenai permasalahan yang terkait (Sugiyono : 218-219). Informan dalam penelitian ini :

- a. Kepala Desa Ngawen
- b. Ketua Pengelola Desa Wisata Ngawen
- c. Bendahara Pengelola Desa Wisata Ngawen

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moloeong (2009:157) bersumber pada kata – kata dan tindakan, selebihnya itu adalah data tambahan berupa dokumen dan lain – lain. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini dari wawancara, catatan lapangan, sumber data tertulis, dan foto yang menggambarkan bagaimana pengelolaan Desa Wisata Ngawen Kabupaten Magelang ditinjau dari aspek pengorganisasian.

Adapun pengumpulan data menurut Sugiyono (2015:137) bila dilihat dari sumber data menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung. Data primer biasanya didapatkan dari wawancara. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil

wawancara dari Pemerintah Desa Ngawen dan Pengelola Desa Wisata Ngawen.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder biasanya didapatkan dari data dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari Pengelola Desa Wisata Ngawen, peraturan yang berlaku di Desa Wisata Ngawen, buku, dan studi pustaka yang mendukung penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati obyek yang akan diamati. Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian mengenai suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung. Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2016 : 226) mengemukakan bahwa observasi itu terbagi menjadi observasi berpartisipasi, observasi terang – terangan dan samar, dan observasi yang tak berstruktur.

Pada penelitian di Desa Wisata Ngawen, Kabupaten Magelang mengumpulkan data dengan menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Jenis observasi ini digunakan peneliti dengan menyatakan terus terang kepada pihak terkait jika akan melakukan penelitian walaupun juga

peneliti juga tidak berterus terang atau tersamar dalam melakukan observasi hal ini terkait data yang dicari itu masih dirahasiakan atau tersembunyi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang secara mendalam untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun dengan rapi dan ketat. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan diri atau *self-report* (Sugiyono, 2015 : 231). Esterberg dalam Sugiyono (2016 : 233) mengemukakan beberapa macam jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur.

Pada penelitian di Desa Wisata Ngawen, Kabupaten Magelang mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara semistruktur dimana dalam melakukan wawancara dengan narasumber selain memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara juga pertanyaan di luar pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Desa Ngawen dan Pengelola Desa Wisata Ngawen.

c. Dokumentasi

Di dalam pengumpulan data ini menggunakan dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain-lain. Dokumen ini sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.

1.9.6 Analisis Data dan Intrepetasi Data

Sugiyono (2016 : 246) mengemukakan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis pada jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi hingga tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Komponen dalam analisis data :

- a. *Data Reduction* (Data Reduksi) yaitu merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema juga polanya. Adanya reduksi data akan memberi gambaran yang lebih mudah dan jelas.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) yaitu penyajian data yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya
- c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan) yaitu setelah data disajikan maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, namun penarikan kesimpulan akan berubah menjadi kesimpulan akhir yang kredibel apabila dalam pengumpulan data di lapangan ditemukan bukti - bukti kuat yang mendukung, valid serta konsisten.

Pada penelitian di Desa Wisata Ngawen, Kabupaten Magelang setelah mengumpulkan data di lapangan, kemudian melakukan reduksi data untuk merangkum dan memilih data yang dibutuhkan, kemudian hasil reduksi data tersebut disajikan atau dilakukan *display* dan terakhir dilakukan adanya penarikan kesimpulan.

1.9.7 Kualitas Data

Untuk mendapat kualitas data yang valid dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik untuk pengecekan data dari berbagai sumber, cara serta waktu (Sugiyono, 2016 : 273). Adapun macam triangulasi menurut Sugiyono antara lain :

- a. Triangulasi Sumber
- b. Triangulasi Teknik
- c. Triangulasi Waktu

Pada penelitian ini menggunakan pengujian data dengan berbagai sumber dimana peneliti tidak hanya berpaku pada satu informan melalui wawancara namun juga dari wawancara informan yang berbeda dan kemudian data tersebut dianalisa dan disesuaikan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan.